USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

SENADA
PROGRAM DAYA SAING INDONESIA

ANALISA PASAR

RANTAI NILAI INDUSTRI FURNITUR

NOVEMBER 2007 — STTA ADAM GRANT

LAPORAN INI DISUSUN UNTUK DITELAAH OLEH THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. LAPORAN INI DISUSUN OLEH **DAI.**

ANALISA PASAR

RANTAI NILAI INDUSTRI FURNITUR

PERNYATAAN

PANDANGAN YANG DIMUAT DALAM LAPORAN INI TIDAK MENCERMINKAN PANDANGAN THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT MAUPUN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penerbitan ini terwujud berkat dukungan yang diberikan oleh The United States Agency for International Development (USAID). Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada perwakilan asosiasi industri, usaha kecil dan menengah, lembaga pemerintahan dan organisasi donor yang telah sangat membantu kami dalam memberikan pemikiran mereka.

Pimpinan Tim:

Mr. David Ray (SENADA Wakil Ketua Kelompok)

Konsultan:

Ms. Dini Rahim (Koordinator SENADA)
Mr. Widodo Hardjono (Penasehat Bidang Industri SENADA)
Mr. Japar Saragih (Penasehat Bidang Industri SENADA)

AKRONIM DAN SINGKATAN

AFLEG	Southeast Asia and Africa FLEG (Asia Tenggara dan Afrika)
ASMINDO	Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (the Indonesian Furniture Producers Association)
C8-Global	Forest management consulting firm (perusahan konsultasi pengelolaan hutan yang berorientasi pasar)
CB	certification body (lembaga sertifikasi)
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species (Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Trancam)
CPET	UK Central Point of Expertise on Timber (Titik Pusat Keahlian Inggris)
CSA	Canada's National Sustainable Forest Management Standard (Standard Pengeloaan Hutan Lestari Nasional Kanada)
ENAFLEG	Europe and North Asia FLEG (Eropa dan Asia Utara)
FLEG	Forest Law Enforcement and Governance (Penegakan Hukum dan Tatakelola Kehutanan)
FLEGT	Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (Penegakan Hukum, Tatakelola dan Perdagangan Kehutanan)
FSC	Forest Stewardship Council
FWI	Forest Watch Indonesia
ICW	Indonesian Corruption Watch
IFC	International Finance Corporation
INDRI	Indonesian (Natural) Resources Institute (Lembaga Sumber Daya Alam Indonesia)
FAO	UN Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB)
G8	the group of eight most industrialized nations in the world (Kelompok delapan negeri paling maju di dunia)
GFS	Global Forest Services
GFTN	WWF's Global Forest & Trade Network (Jaringan Hutan dan Perdangan Global WWF)
GTZ	German Technical Cooperation agency (Lembaga Kerjasama Teknis Jerman)
LEI	Lembaga Ekolabel Indonesia (the Indonesian Ecolabeling Institute)
MTCC	Malaysian Timber Certification Council (Dewan Sertifikasi Kayu Malaysia)
NGO	non-government organization (lembaga swadaya masyarakat LSM)
NWG	Vietnam National Working Group on Sustainable Forest Management (Kelompok Kerja Nasional Vietnam untuk Pengelolaan Hutan Lestari)
PEFC	Program for the Endorsement of Forest Certification (Program untuk Dukungan Sertifkasi Hutan)
PENSA	IFC's Program for Eastern Indonesia SME Assistance (Program Bantuan untuk UKM di Indonesia Timur dari IFC)
REFAS	Rural Development Reform of the Forestry Administration Structure (Reformasi Pembangunan Pedesaan dari Struktur Administrasi Kehutanan)
SA	social accountability (tanggungjawab sosial)
SA8000	Social Accountability International certification requirements (persyaratan sertifikasi tanggungjawab sosial internasional)
SFE	state forest enterprise (perusahaan hutan negara)
SFI	Sustainable Forestry Initiative (Inisitif Hutan Lestari)
SME	small and medium enterprise (usaha kecil menengah UKM)
SGS	International forest certification body (Lembaga sertifikasi internasional terkemuka)
SIPPO	Swiss Import Promotion Program (Program Promosi Impor Swiss)
SPWP	Secondary processed wood products (produk kayu yang diproses secara sekunder)
TFT	Tropical Forest Trust
TNC	The Nature Conservancy

TTF	Tropical Forest Foundation
TTAP	Timber Trade Action Plan (Rencana Aksi Perdagangan Kayu)
TUV	A global leader in independent testing and assessment services (lembaga terkemuka dalam layanan penilaian dan ujicoba)
VLO	Verification of Legal Origin (Verifikasi Asal Muasal yang Legal)
VPA	Voluntary Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Sukarela)
WRAP	Worldwide Responsible Accredited Production (Produksi Terakreditasi Bertanggungjawab Dunia)
WSSD	World Summit on Sustainable Development (KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan)
WWF	World Wildlife Fund (lembaga kelestarian fauna)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **VI**

1. TREN PERMINTAAN UNTUK PRODUSER FUNITURE **1**

1.1. SEKTOR FURNITUR INDONESIA 1
1.1.1. TANTANGAN YANG DIHADAPI INDUSTRI FURNITUR 2
1.1.2. INDUSTRI KAYU INDONESIA DAN LEGALITAS 2
1.2. PERATURAN, KEBIJAKAN DAN TREN BARU YANG MENGHARUSKAN VERIFIKASI LEGAL 4
1.2.1. PERIJINAN: SKEMA FLEGT UNI EROPA 5
1.2.2. PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENGHENTIKAN PRODUK-PRODUK ILEGAL 5
1.2.3. KEBIJAKAN PENGADAAN PUBLIK 6
1.2.4. TREN SEKTOR RANTAI PASOKAN SWASTA 8
1.2.5. RENCANA AKSI PERDAGANGAN KAYU 9
1.3. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NEGARA PESAING REGIONAL 9
1.3.1. CINA 9
1.3.2. VIETNAM 10
1.4. KESIMPULAN 10

2. STRATEGI UNTUK PERAN SERTA SENADA **12**

2.1. STRATEGI KUNCI DAN ALASAN 12
2.1.1. IDENTIFIKASI PERUSAHAN YANG DICALONKAN 12
2.1.2. DUKUNGAN KLIEN 12
2.1.3. MENGIDENTIFIKASI MITRA ORGANISASI (PEMBERI DANA, LSM DAN BADAN SERTIFIKASI) 12
2.1.4. HUBUNGAN PASAR 13
2.1.5. PELAKSANAAN KERJA ADVOKASI 13

3. PENILAIAN ORGANISASI MITRA POTENSIAL (KELEBIHAN DAN KEKURANGAN) **14**

3.1. PROGRAM SMARTWOOD DARI RAINFOREST ALLIANCE (BADAN SERTIFIKASI) 14
3.2. SGS (BADAN SERTIFIKASI) 14
3.3. TROPICAL FOREST TRUST 15
3.4. TROPICAL FOREST FOUNDATION 15
3.5. TUV 15
3.6. WWF – GLOBAL FOREST & TRADE NETWORK (GFTN) 16
3.7. PENSA (DONOR) 16
3.8. INDONESIAN (NATURAL) RESOURCES INSTITUTE (INDRI) 17
3.9. GLOBAL FOREST SERVICES 17
3.10. C8-GLOBAL 18

4. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM **19**

4.1. RENCANA KERJA 19
4.1.1. BERHUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KONSULTASI 19
4.1.2. BEKERJA DENGAN PERUSAHAN KONSULTASI UNTUK MEMVERIFIKASI KLIEN PERTAMA 19
4.1.3. TERUS MENGKAJI ULANG KOMPETENSI DAN KUALITAS PERUSAHAAN KONSULTANSI 19
4.1.4. KAJI DAN EVALUASI BADAN SERTIFIKASI TERPILIH 19
4.1.5. PILIH KLIEN LEBIH LANJUT UNTUK DIBANTU DAN KONTAK PERUSAHAAN KONSULTANSI 20
4.1.6. MEMFASILITASI TAUTAN PASAR UNTUK KLIEN SENADA 20
4.1.7. LAKUKAN KAMPANYE SOSIALISASI 20
4.2. JADWAL RENCANA PELAKSANAAN 21

5. KEGIATAN-KEGIATAN PELAKSANAAN 22

5.1. PERTEMUAN AWAL TIM DAN PELATIHAN TENTANG LEGALITAS DAN SERTIFIKASI PADA SEKTOR KEHUTANAN 22
5.2. LOKAKARYA ADVOKASI PENGENALAN SENADA 22
5.3. PERTEMUAN CALON MITRA 23
5.4. PENILAIAN ANALISIS MASALAH KLIEN INDIVIDU AND PEMBUATAN RENCANA AKSI 23
5.5. INFORMASI SUMBER DAN BAHAN 24

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 25

6.1. KESIMPULAN 25
6.2. REKOMENDASI 25

DAFTAR PUSTAKA 27

LAMPIRAN 28

DAFTAR PERUSAHAAN DAN MITRA YANG DIKUNJUNGI 28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membantu SENADA dalam membangun sebuah pemahaman tentang kebutuhan dan peluang untuk meningkatkan daya saing industri furnitur kayu Indonesia. Acara yang berlangsung selama 40 hari mencakup pertemuan dengan perusahaan furnitur, asosiasi industri usaha, dan organisasi terkait dan lembaga-lembaga di seluruh Jawa. Selama program ini konsultan memberikan arahan pada tim SENADA tentang topik seperti pentingnya pembelian yang bertanggung jawab sampai penyediaan kayu yang berkesinambungan bagi industri dan berbagai pengetahuan yang penting bagi proyek ini. Semua ini tidak tercantum dalam laporan karena masalah ruang, tetapi topik-topik disebutkan disebutkan dalam Bab V.

SENADA mendapatkan kesempatan emas untuk memberikan bantuan yang berguna dan dibutuhkan oleh industri furnitur kayu Indonesia dengan mendukung sektor ini untuk memperbaiki pengadaan bahan mentah melalui verifikasi sumber yang legal. Kita yakin bahwa pendekatan profesional dan pengetahuan dapat mendongkrak daya saing industri, memberikan peluang besar bagi individu perusahaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kesempatan kerja dan membuat dana USAID menjadi bermanfaat. Program pembelian yang bertanggungjawab bagi produk-produk hutan bertujuan untuk memperbaiki kinerja lingkungan hidup dan sosial bagi basis pasokan dengan mengakhiri pembelian produk-produk yang berasal dari kayu ilegal atau dari sumber yang tidak jelas, dan dengan secara terus menerus meningkatakan proporsi pembelian produk hutan yang berasal dari kayu dari hutan-hutan yang bersertifit yang dapat dipercaya.

Untuk mencapai transisi ini, dari manapun titik permulaannya, SENADA telah membangun sebuah program aktifitas yang dapat membantu sektor furnitur kayu Indonesia untuk memelihara dan mengembangkan pangsa pasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mempraktekkan pengadaan kayu yang bertanggungjawab dan karena itu memastikan semua pasokan bahan mentah terverifikasi secara legal asal muasalnya. SENADA akan mensosialisasikan kesuksesan program ini pada sektor lain sebagai bagian dari kampanye advokasi yang lebih luas tentang pentingnya pengadaan yang bertanggungjawab dan verifikasi melalui pihak ketiga.

Rekomendasi selengkapnya akan diberikan pada akhir laporan ini.

1. TREN PERMINTAAN UNTUK PRODUSER FUNITURE KAYU DI INDONESIA

Konsep daya saing pasar melalui penyempurnaan kebijakan sistem penyediaan kayu berawal dari semakin besarnya permintaan untuk produk-produk yang telah terverifikasi secara sah di pasar internasional. Uni Eropa saat ini sedang mengembangkan Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement, VPA*) di bawah program *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT, Penegakan Hukum, Tatakelola dan Perdagangan Hutan) dengan negara pengekspor kayu untuk mencegah ekspor ke UE produk kayu yang berasal dari kayu ilegal.

Perjanjian VPA ini dijadwalkan berlaku pada tahun 2008 dan diperkirakan akan mengakibatkan penutupan pasar yang bertahap selama periode waktu tertentu. Ada sekian banyak perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dengan negara-negara yang peduli terhadap pencegahan penebangan liar yaitu: Inggris, Jepang, Norwegia, dan Cina. Indonesia juga sedang dalam pembicaraan untuk mengembangkan perjanjian bilateral serupa dengan Amerika Serikat. Perjanjian-perjanjian bilateral ini telah memberikan dasar untuk mengembangkan baik solusi nasional maupun internasional bagi masalah-masalah penebangan liar di Indonesia. Perjanjian-perjanjian itu juga memberikan tekanan pada sektor pabrikan kedua, seperti misalnya sektor furnitur, untuk menjalankan kebijakan pembelian yang bertanggungjawab untuk tetap berada di pasar tertentu.

Program SENADA pada sektor furnitur akan terfokus untuk mempersiapkan industri ini untuk menyiasati perubahan dalam kebijakan pengadaan internasional. Laporan ini berisi analisa tentang situasi saat ini dalam sektor kehutanan dan furnitur Indonesia dan mempelajari kebijakan yang sedang berkembang dalam pengadaan bahan yang akan berpengaruh pada sektor furnitur Indonesia.

1.1. SEKTOR FURNITUR INDONESIA

Pasar furnitur internasional pada tahun 2006 diperkirakan bernilai sekitar 66 milyar dolar Amerika, di mana Indonesia menguasai hanya 2 persennya. Pada tahun 2007 permintaan diperkirakan akan tumbuh antara 5 sampai 7 persen. Cina dan Italia saat ini menjadi pemasok pasar global terbesar dengan nilai ekspor gabungan sekitar 9,3 milyar dolar Amerika.Sudah jelas bahwa bahkan di Asia Tenggara, Indonesia teringgal di belakang negara-negara tetangga Malaysia dan Vietnam. Banyak kalangan mengatakan situasi ini diakibatkan oleh meningkatnya hambatan-hambatan operasional yang mengikis daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara penghasil lainnya. Kenaikan harga bahan bakar terakhir, rata-rata sekitar 126 persen, mendorong biaya operasional naik 25 persen, dan dengan adanya usulan kenaikan tarif listrik untuk industri diperkirakan biaya akan naik sekitar 20 persen lagi.

Naiknya biaya operasional telah mendorong kenaikan harga eceran dan ini berarti Indonesia beresiko kehilangan pangsa pasar global. Diperkirakan pasar hanya akan mentoleransi kenaikan pada biaya pemrosesan maksimal 6 persen. Di pasar domestik, para produsen furnitur semakin kalah bersaing dengan barang-barang Cina. Menurut data ASMINDO, total impor furnitur meningkat sekitar 78 persen tahun lalu. Produksi furnitur kayu di tahun 2004 mencapai 2.483.067 meter kubik, namun di tahun 2005 turun menjadi 2.330.389 meter kubik dan di tahun 2006 menjadi 2.258.882 meter kubik. Satu hal penting yang menjadi pertimbangan adalah menurunnya angka rata-rata dan volume produksi dari 2.483.067 meter kubik di tahun 2004 menjadi 2.258.882 meter kubik di tahun 2006 disebabkan kurangnya pasokan kayu dan rotan akibat dari pembalakan liar dan ekspor kayu ilegal.

Namun nilai nominal produk ekspor meningkat, dari 1.58 milyar dolar Amerika di tahun 2004 menjadi 1.65 milyar dolar Amerika pada tahun 2005, dan di tahun 2006 naik menjadi 2.38 milyar dolar

Amerika. Ekpor meningkat sekitar 3.5 persen di tahun 2006 setelah naik sekitar 4 persen setahunnya selama lima tahun terakhir. Satu perkembangan tertinggi antara 5-7 persen diharapkan pada tahun mendatang. Jumlah furnitur kayu meliputi tiga per empat dari total ekpor furnitur, diikuti oleh furnitur rotan (21 persen), furnitur metal (2 persen) dan furnitur bambu (1 persen). Pasar terbesar furnitur kayu Indonesia adalah Amerika Serikat (24 persen dari total ekspor), Jepang (7 persen), Belanda dan Perancis (masing-masing 5 persen). Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama untuk furnitur rotan.

Furnitur kayu memberikan kontribusi paling besar bagi ekspor nasional dengan mencapai 672.311 ton senilai 1.32 milyar dolar Amerika sementara ekspor komponen furnitur mencapai 907.158 ton senilai 746,08 juta dolar Amerika. Karena itu bagi Indonesia ini masih merupakan sektor usaha yang cukup besar. Statistik mencatat bahwa sektor furnitur Indonesia terdiri dari 3.500 perusahaan dengan lebih dari dua juta pekerja. Furnitur kayu mendominasi sektor ini, meliputi dua 2/3 dari total ekspor furnitur. Industri furnitur berpusat di Jawa (terutama Jepara, Semarang, Solo dan Surabaya), di mana furnitur mencakup 40 persen dari total ekspor Jawa. Jepara khususnya terkenal dengan furnitur kayu yang diukir. Perusahaan kecil memasarkan produk mereka melalu jaringan toko furnitur yang menjual barang secara lokal. Ekspor dilakukan dengan cara sub-kontrak dan usaha kecil berperan aktif dalam ekspor. Industri furnitur Indonesia sangat bergantung kepada kayu sebagai bahan baku dengan kebutuhan pertahun mencapai 4,5 juta meter kubik. Meskipun Indonesia adalah produsen kayu terbesar kedua di dunia, industri ini menghadapi kekurangan bahan baku. Spesies kayu utama untuk ukiran adalah jati, mahogany dan sonokeling (Dalbergia latifolia). Hampir separuh dari total produksi rotan berasal dari Cirebon.

1.1.1. TANTANGAN YANG DIHADAPI INDUSTRI FURNITUR

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan ekspor furniturnya. Pertama, walaupun Indonesia memiliki sumber hutan yang luas, penebangan dan perdagangan kayu ilegal telah mempengaruhi pasokan kayu pada sektor funitur. Hal ini diperburuk oleh pengurangan kuata penebangan oleh pemerintah untuk hutan alami menjadi 5,7 juta meter kubik pada tahun 2004 dan 5,4 juta meter kubik pada tahun 2005. Mentri kehutanan mengumumkan bahwa kuota panen kayu alami untuk tahun 2007 akan meningkat menjadi 9.1 juta meter kubik, meningkat sekitar dua belas persen dibandingkan tahun 2006. Kuota panen diturunkan antara tahun 2001 dan tahun 2005 untuk mencapai hasil yang berkesinambungan dan menurunkan kelebihan kapasitas pada tempat pengolahan kayu dan kayu lapis, dimana, pemerintah percaya, telah memenuhi tahap tertentu.

Industri kayu Indonesia telah menciut pada beberapa tahun terakhir karena berkurangnya keberadaan kayu gelondongan. Jumlah kapasitas produksi tempat pengolahan kayu olahan dan kayu lapis menurun tajam selama periode itu. Menurunnya pasokan kayu lapis Indonesia mendorong kenaikan tajam harga kayu lapis pada tahun 2006. Menurut perkiraan pengamat, kuota penebangan pada tahun 2006 tidak digunakan sepenuhnya oleh perusahaan pengolah kayu karena berkurangnya kapasitas produksi dan kesulitan keuangan. Beberapa pengamat karena itu percaya bahwa meningkatkan kuota penebangan untuk tahun 2007 bukan berarti mendorong pada kebangkitan industri kayu Indonesia.

1.1.2. INDUSTRI KAYU INDONESIA DAN LEGALITAS

Hutan hujan tropis Indonesia, terbesar dan terkaya di Asia, terus berkurang dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan yaitu 3,5 juta hektar (hampir sembilan juta acre) per tahun – sepadan dengan 500 lapangan sepakbola per jam. Kebanyakan dari penggundulan ini didorong oleh permintaan kayu dan bubur kertas di Asia.Sekitar dua per tiga dari penebangan di hutan Indonesia dilakukan secara ilegal. Diperkirakan 300.000 meter kubik kayu diselundupkan dari Indonesia per bulan, banyak di antaranya ke pasar Asia (Cina dan Jepang) dan Eropa. Diperkirakan tingkat konsumsi kayu dunia akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2050.

Ada momentum baru untuk perubahan dalam pasar perkayuan dikarenakan perubahan dalam praktek bisnis dan kebijakan pemerintah. Di Amerika Utara dan Eropa, pasar sudah lebih memilih produk hutan yang ramah lingkungan. Hal ini telah berdampak pada pemasok. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan hasil hutan menanamkan investasi sukarela untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Pembalakan liar dan perdagangan kayu internasional ilegal merupakan masalah besar bagi banyak negara penghasil kayu di dunia ketiga. Praktek ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, merugikan pemerintah milyaran dollar, mendorong korupsi, merongrong supremasi hukum dan tatakelola pemerintahan yang baik dan mendanai konflik bersenjata. Hal seperti ini menghambat pembangunan yang berkelanjutan di beberapa negara paling miskin.

Dalam pasar kayu dan produk kayu dunia yang bernilai AS$270 milyar, nilai dari kayu tropis yang diekspor dari negara produsen sebagai kayu gelondongan, kayu potong, venir dan kayu lapis pada tahun 2003 adalah AS$7,3 milyar. Ekspor produk kayu jadi sekunder (SPWP) dari negara penghasil kayu tropis sebesar AS$8,3 milyar. Nilai dari kayu dan produk kayu yang diekspor dari Russia dan negara Baltik, di mana ada kekhawatiran signifikan tentang keabsahannya, berjumlah AS$8,3 milyar menurut data FAO.

Secara definisi, skala penebangan liar sulit untuk diperkirakan, namun dipercayai bahwa lebih dari setengah dari kegiatan penebangan yang terjadi di sebagian besar wilayah hutan yang rentan — Asia tenggara, Afrika tengah, Amerika Selatan dan Rusia — kemungkinan dilakukan secara ilegal. Di seluruh dunia, dapat diperkirakan bahwa kegiatan ilegal dapat mencapai lebih dari sepersepuluh perdagangan kayu, dengan produk senilai sedikitnya 15 milyar dolar Amerika setahun. Uni Eropa (termasuk Inggris), Amerika Serikat serta Jepang merupakan pasar utamanya. Di banyak negara penghasil kayu puluhan tahun penebangan industri kayu berskala besar telah gagal untuk menghasilkan menajemen hutan yang bertanggung jawab secara ekologi dan secara sosial, pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan. Indonesia adalah salah satunya dan tempat di mana masalah-masalah seperti ini diperburuk karena tingkat kemampuan institusi dan sistem pemerintahan yang lemah dan tingginya korupsi.

Penebangan liar pada skala industri bisa menjadi bencana bagi masyarakat, bagi lingkungan dan juga perekonomian Indonesia. Selain dari dampak internal pada masyarakat. kayu murah dari sumber ilegal dan merusak pada pasar dunia mengakibatkan persaingan yang tidak sehat bagi perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang bertanggungjawab dan taat pada peraturan pasar yang bertanggungjawab. Banyak dampak yang dirasakan oleh Indonesia karena aktifitas-aktifitas ilegal saat ini:

- **Lingkungan hidup.** Penebangan liar menggungduli hutan, menghancurkan habitat dan spesies-spesies langka dan menghambat kemampuan tanah untuk menyerap emisi karbon dioksida, yang mengakibatkan perubahan iklim.

- **Fisik.** Pengrusakan hutan seringkali menyebabkan efek merusak seperti banjir bandang, tanah longsor, kepunahan spesies dan lain sebagainya.

- **Keuangan.** Penebangan hutan merugikan keuangan pemerintah. Diperkirakan pemerintah Indonesia kehilangan lebih dari 4 milyar dolar Amerika dalam satu tahun karena pendapatan yang hilang.

- **Sosial.** Penebangan hutan merongrong supremasi hukum danpemerintah, dan seringkali dihubungkan dengan korupsi, khususnya dalam alokasi HPH. Dilindungi yang berkuasa, perusahaan kayu mungkin dapat mengabaikan peraturan-peraturan negara tanpa adanya sangsi.

- **Hubungan dengan perdagangan.** Kayu gelondongan ilegal, yang biasanya lebih murah daripada produk yang sah, menciptakan distorsi di pasar global dan merusak insentif bagi pembangunan hutan lestari. Sebuah studi yang diterbitkan oleh American Forest and Paper Association (Asosiasi Hutan dan Kertas Amerika) pada tahun 2004 memperkirakan bahwa harga pasaran dunia tertekan antara lima sampai 16 persen (tergantung jenis produk) karena aktifitas ilegal.

Negara-negara konsumen ikut berperanserta dalam masalah ini dengan mengimpor kayu dan produk-produk kayu tanpa memastikan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang sah. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir negara-negara konsumen dan produsen sepertinya telah semakin perhatian terhadap penebangan liar, dengan banyaknya aktifitas mereka yang dipicu oleh Program Aksi G8 untuk Hutan (G8 Action Program on Forests 1998 – 2002).
Inisiatif utamanya mencakup:

- Serangkaian diskusi dan deklarasi, termasuk konferensi Penegakan Hukum dan Penataan Hutan (Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)) di Asia Timur, Afrika (tahun 2005), Eropa dan Amrika Utara.
- Perjanjian bilateral antara konsumen individu dan negara produsen untuk meningkatkan penegakan hukum dan menjaga agar produk ilegal tidak masuk ke perdagangan internasional.
- Langkah-langkah untuk menjaga agar kayu gelondongan ilegal tidak masuk ke pasar internasional – terutama Rencana Aksi Penegakan Hukum, Penataan dan Perdagangan Kehutanan Uni Eropa (EU's Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan), yang terpusat pada sistem perijinan bagi kayu yang diimpor secara sah dari negara-negara mitra.
- Penggunaan kebijakan pengadaan pemerintah untuk memastikan bahwa hanya produk-produk kayu gelondongan yang sah (dan lestari) – lah yang dibeli oleh pembeli pemerintah.
- Usaha untuk memastikan bahwa penanaman modal pada industri yang berkaitan dengan kayu, baik melalui jalur bank swasta ataupun badan pemerintah, tidak membantu aktifitas ilegal.
- Bantuan dengan penegakan hukum yang lebih baik di negara-negara produsen, dan pendirian sistem untuk melacak pergerakan produk-produk ilegal.
- Insiatif industri untuk bekerjasama dengan para pemasok untuk mendapatkan kayu dari sumber yang legal.

1.2. PERATURAN, KEBIJAKAN DAN TREN BARU YANG MENGHARUSKAN VERIFIKASI LEGAL

Bagian atas dari tulisan ini telah menjelaskan bahwa meskipun industri furnitur kayu Indonesia hanya berperan kecil secara internasional, namun secara nasional industri merupakan sektor produksi yang penting. Namun dikarenakan terbatasnya pangsa pasar internasional, Indonesia berpotensi besar untuk meningkatkan penjualannya di masa depan. Meskipun untuk melakukan hal ini Indonesia harus berkerja dalam pasar yang berubah. Pasar sedang berubah menjadi pasar yang taat pada kebijakan pengadaan yang bertanggungjawab secara sosial, baik pemerintah maupun swasta, dan karenanya furnitur Indonesia harus proaktif dalam strateginya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Kemampuan untuk mememnuhi permintaan pasar baru lebih penting bagi Indonesia karena secara global merupakan produsen terbesar kedua untuk kayu tropis.

Bagian berikutnya dari laporan ini akan mendalami lebih dalam beberapa wahana dan perundang-undangan yang sedang dibuat yang akan mempengaruhi industri produksi hutan Indonesia dan karenanya sektor furnitur kayu. Semakin besarnya permintaan produk-produk bersertifikasi akan mewajibkan di masa depan bahwa setidaknya para eksportir furnitur kayu ke Uni Eropa akan dapat membuktikan asal yang sah dari bahan mentah mereka.

Yang harus dicatat bahwa kekuatan utama di balik naiknya permintaan adalah perubahan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah dan para penjual besar. Permintaan dari konsumen pemakai bisa dikatakan sedikit dan sayangnya bukan dikarenakan kekuatan pendorong di balik perubahan dalam pengadaan kayu.

1.2.1. PERIJINAN: SKEMA FLEGT UNI EROPA

Pemerintah yang ingin mencegah impor produk-produk kayu gelondongan ilegal memasuki negara mereka dihadapkan pada masalah langsung: bagaimana membedakan barang-barang legal dari yang ilegal? Hal ini merupakan pokok penting dari Rencana Aksi Uni Eropa untuk Penegakan Hukum, Tatalaksana and Perdagangan Kehutanan (FLEGT), yang aslinya dipublikasikan pada bulan Mei 2003.

Rencana aksi sangat bergantung pada negosiasi Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT (*Voluntary Partnership Agreements* (VPAs) dengan para negara produsen. Perjanjian ini akan menghasilkan di tiap negara sebuah sistem perijinan tiap negara yang dirancang untuk mengenali produk-produk legal dan memberikan izin pada produk itu untuk diimpor ke Uni Eropa; sedangkan produk yang tidak berlisensi – dan karena itu kemungkingan produk ilegal – akan ditolak masuk di perbatasan Uni Eropa. Perjanjian tersebut akan mencakup pemberian bantuan pengembangan kapasitas terhadap negara-negara mitra untuk membentuk skema perijinan, memperbaiki penegakan peraturan, dan jika diperlukan, mereformasi hukum – dan, jika memungkinkan, provisi untuk pemeriksanaan independen mengenai keabsahan pengeluaran ijin, memverifikasi prilaku hukum pada tiap tahapan rantai penanganan kayu. Mulai bulan Mei tahun 2006, negosiasi VPA sedang berlangsung antara Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa telah mengamandemen sistem hukumnya sendiri dengan menyetujui sebuah peraturan baru (pada bulan Desember 2005) yang mewajibkan otoritas pabeannya untuk menolak masuknya produk-produk tak berlisensi dari negara-negara mitra. Pada tahap awal, skema lisensi hanya akan meliputi jumlah produk terbatas – kayu mentah, kayu gergaji, kayu lapis dan venir – namun ada niat untuk memperluasnya kepada produk jenis lain secepat mungkin dan diperirakan akan mencakup furnitur.

Sistem perijinan yang dirancang untuk mencegah produk tertentu adalah mekanisme yang lumrah dalam perdagangan internasional. Sistem Lisensi kayu FLEGT pada prakteknya mirip dengan sistem-sistem yang sudah terdapat di beberapa perjanjian internasional, termasuk Convention on International Trade in Endangered Species (Konvensi Perdagangan Spesies Terancam Internasional, CITES), the Protokol Montreal tentang zat pengikis ozone dan Proses Kimberley tentang permata konflik. Bedanya, tidak ada sistem yang perjanjian global yang setara untuk mengembangkan sebuah skema perijinan kayu, dan karenanya sistem FLEGT dibangun melalui serangkaian perjanjian-perjanjian bilateral.

1.2.2. PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENGHENTIKAN PRODUK-PRODUK ILEGAL

Selain skema lisensi FLEGT, ada ketertarikan untuk kemungkinan penggunaan perijinan domestik Uni Eropa yang telah ada, ataupun yang baru untuk membidik kayu ilegal yang diimpor dari negara-negara non-VPA, atau negara VPA dengan cara menghindari pengawasan. Studi tentang perundangan yang mungkin relevan dilakukan dalam di negara-negara anggota Uni Eropa pada tahun 2005 – 06. Yang paling maju di kalangan negara-negara Uni eropa adalah Inggris dan saat ini pemerintah Inggris sedang mempelajari empat wilayah perijinan yang telah ada, dan menyimpulkan bahwa:

- Hukum yang berurusan dengan pencurian dan penanganan barang curian dapat diterapkan pada produk-produk curian yang diimpor ke Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya harus dibuktikan bahwa mereka yang mengimpor produk-produk itu memang mengetahui bahwa produk itu barang curian – yang umumnya tidak demikian. Hukum ini juga akan diterapkan untuk kayu curian saja, bukan untuk kategori kayu "ilegal" yang lain – misalnya, produk-produk yang diekspor tanpa membayar cukai ekspor

- Ada kemungkinan pemilik asal kayu (dari negara produsen) akan menuntut secara perdata mereka yang telah mengimpor kayu-kayu tersebut ke Inggris, atau pembelinya. Agar kasusnya dapat berhasil, harus dibuktikan bahwa kayu gelondongan curian yang telah dicuri dari pemilik asli adalah kayu yang sama yang di impor masuk ke Inggris (hal ini tidak selalu mudah), namun tidak harus dibuktikan bahwa si importir atau si pembeli mengetahui bahwa kayu itu adalah hasil curian.
- Jika produk ilegal diberikan gambaran tertentu secara tidak benar untuk tujuan impor, kasusnya harus diajukan menurut peraturan pabean. Namun, pada praktikya hal ini kecil sekali relevansi.
- Undang-undang pencucian uang dapat digunakan jika hasil penebangan liar (produknya itu sendiri atau uang atau asset-asset lain yang dihasilkan dari penjualannya) disimpan di Inggris. Hal ini diperkirakan akan jadi sangat relevan manakala ada barang bukti yang meyakinkan akan adanya tindak kejahatan yang ada dari negara produsen asli – misalnya, dari vonis kejahatan atau paling tidak suatu kasus pengadilan yang sedang berjalan – dan aliran produk dan uang dapat dilacak. Jika tidak ada barang bukti, sepertinya sulit untuk memenangkan suatu kasus.

Kesulitan kerjasama antar lembaga penegak hukum di negara yang berbeda, masalah mendapatkan barang bukti dari negara asing, dan kerumitan untuk melacak pergerakan produk yang melewati ribuan mil, semuanya bercampur membuat kasus-kasus yang diperkarakan melalui opsi di atas menjadi sulit – walaupun tidak selalu tidak mungkin – untuk dibuktikan.Mengingat kesimpulan ini, Uni Eropa sedang mempelajari apakah ada dibutuhkan tambahan undang-undang, baik di Uni Eropa maupun di tingkat negara anggotanya. Pilihan utama sepertinya adalah undang-undang yang mengikuti Legal Timber Protection Act di Amerika yang mengkriminalkan impor flora dan fauna ilegal, termasuk kayu haram. Aslinya ini adalah US Lacey Act dan direvisi pada bulan Maret 2007 untuk mengikutsertakan kayu.

Undang-undang di Uni Eropa, atau di negara-negara anggotanya (mungkin kedua-duanya) akan menghindari masalah-masalah yang terkait dengan perundang-undangan domestik seperti dibahas di atas. Legal Timber Protection Act, misalnya, meliputi seluruh produk-produk ilegal (bukan hanya yang curian) dan dapat diterapkan wakaupun importirnya tidak tahu bahwa barang-barang yang mereka urus adalah ilegal. Namun demikian, jaksa penuntut masih harus menujukkan beberapa bukti kegitan ilegal aslinya, yang tidak selalu secara gampang untuk dibuktikan.

Masalah utamanya dari pendekatan-pendekatan ini adalah sulitnya menunjukkan bahwa produk-produk yang dipertanyakan sebenarnya memang diproduksi secara ilegal. Inilah kenapa skema perijinan, yang bertujuan untuk membedakan antara produk legal dan ilegal, sepertinya lebih efektif – selama sistemnya dapat dikembangkan untuk menghindari celah hukum seperti dibahas di atas pada bagian 4.1 Undang-undang yang meniru Legal Timber Protection Act di Amerika, dapat menjadi sebuah penguat bagi skema ini, dan menambahkan kerugian bagi mereka yang mencoba membawa kayu ilegal ke Uni Eropa. Komisi Uni Eropa dijadwalkan mengumumkan kesimpulan berdasarkan kebutuhan perundang-undangan tambahan pada akhir tahun 2007 ini.

1.2.3. KEBIJAKAN PENGADAAN PUBLIK

Di semua negara maju, pemerintah (pusat, wilayah dan lokal) adalah konsumen utama kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan yang berdiri sendiri. Meskipun sulit mendapatkan angka pasti, pengeluaran belanja oleh otoritas berwenang di Uni Eropa, sebagai contoh, diperkirakan mencapai angka 16-18 persen dari Produk Domestik Bruto per tahun, dan biasanya diasumsikan bahwa angka tersebut meliputi jumlah proporsi yang sama dengan pembelian kayu dan produk-produk kayu.

Pemerintah memiliki kekuatan besar dalam memberlakukan persyaratan bagi belanja mereka sendiri daripada membuat peraturan bagi negara keseluruhan, dan sejumlah kebijakan pengadaan yang diterapkan yang secara khusus menyatakann bahwa semua produk kayu yang dibeli pemerintah harus

diproduksi secara legal (dan lestari). Di beberapa negara, ini merupakan suatu tanggapan eksplisit dari meningkatnya kekhawatiran pada penebangan liar, sementara di tempat lain merupakan suatu perkembangan dari kekhawatiran yang sudah ada tentang masalah lingkungan hidup dalam lingkup yang luas. Perkembangan kebijakan pengadaan publik untuk kayu mencapai kemajuan paling tinggi di Uni Eropa, dan dukungan penggunaannya disertakan dalam Rencana Aksi FLEGT:

Empat negara yang telah memiliki kebijakan pengadaan kayu cukup komprehensif (Denmark, Perancis, Belanda dan Inggris) mengembangkan kebijakan mereka dengan cara yang sedikit berbeda. Di Denmark kebijakan itu bersifat sukarela, misalnya, sementara negara lainnya secara wajib; Denmark hanya melingkupi kayu tropis, sementara yang lainnya mencakup semua sumber; dan juga tingkat bukti yang dapat diterima untuk memenuhi kriteria juga berbeda antara tiap negara. Lebih-lebih lagi, mereka juga berbeda dalam hal kriteria dan definisi. Kebijakan Perancis dan Belanda utamanya bertujuan untuk mendapatkan kayu yang dikelola secara lestari; kayu semacam ini memang sudah seharusnyalah legal, namun ini hanya efek samping dan bukan tujuan utamanya. Sistem Denmark dan Inggris, telah dirancang untuk mendapatkan kayu yang legal dan juga lestari, mengakui bahwa walaupun kayu lestari jauh lebih baik, produk seperti ini mungkin tidak selalu ada dan cukup persediannya, dan karena itu standar minimum bukti pengesahan diwajibkan untuk semua pembelian. Legalitas umumnya diartikan sebagai mematuhi hukum di negara produsen.

Namun demikian, ke-empat negara menggunakan definisi yang berbeda dari "yang diproduksi secara lestari". Perbedaan yang mencolok adalah pertanyaan apakah kriteria sosial di atas kriteria yang diperundangkan di negara produsen itu sendiri – misalnya, standar kesehatan dan keselamatan internasional pada tenaga kerja perkayuan, atau hak kepemilikan tanah penduduk setempat – dapat diikutsertakan. Apapun kriteria yang mereka pilih, semua negara-negara ini harus menghadapi masalah bagaimana mengoperasikan kebijakan mereka – misalnya pada prakteknya, bagaimana mereka dapat memastikan bahwa pembeli pemerintah membeli produk-produk yang masuk dalam kriteria mereka. Ini adalah bagian dari tugas lembaga UK CPET dan pada fase pertama tugasnya mencakup suatu evaluasi sejauh mana sistem sertifikasi utama memenuhi kriteria Inggris. (Kelima-limanya telah memenuhi kriteria pengesahan, namun hanya FSC dan CSA yang memenuhi kriteria lestari, sedangkan PEFC, SFI dan MTCC belum memenuhi kriteria). Belakangan, setelah PEFC dan SFI disempurnakan, diputuskan bahwa sekarang mereka telah memenuhi kriteria lestari).

CPET juga harus mengevaluasi dokumentasi alternatif yang mungkin dapt menunjukkan legalitas dan kelestarian, bila produk-produk yang tidak disahkan oleh skema sertifikasi yang ada (Kebijakan pengadaan Uni Eropa tidak mengijinkan negara anggotanya menyebut produk-produk tertentu yang tercakup dalam skema terntentu, mereka hanya merdasarkan pada kriteria yang ada), dan menjalankan pelatihan peningkatan kesadaran dan berlatih dan memonitor implementasi kebijakan antar lembaga pemerintah. Walaupun pemerintah Uni Eropa lainnya yang memiliki kebijakan pengadaan kayu tidak memiliki badan-badan seperti CPET, tetap saja harus mencari cara untuk melaksanakan fungsi yang sama. Akhirnya, harus dicatat bahwa kebijakan-kebijakan pengadaan ini hanya diberlakukan di pemerintah pusat. Namun demikian, banyak pemerintah wilayah dan pemerintah daerah menunjukkan minat pada bidang ini. Beberapa di antaranya telah membuat kebijakan sendiri dengan meniru kebijakan pemerintah pusat, dan ada juga yang menganbil kebijakan-kebijakan berbeda, kerapkali berdasarkan standar FSC, jika memang ada.

Dibeberapa negara ini, kebijakan pengadaan masih terlalu baru dan dampaknya masih belum dapat diukur. Di luar Uni Eropa masih sedikit negara-negara yang mengembangkan kebijakan pengadaan kayu yang khusus untuk merespon perdebatan seputar pengendalian pembalakan liar. Namun pemerintah pusat, pemerintah wilayah dan pemerintah daerah di negara-negara maju banyak mengembangkan beragam kebijakan pengadaan yang "ramah lingkungan". Banyak pemerintah daerah yang mendukung pemakaian produksi kayu yang lestari dalam proyek pembangunan gedung, dan pihak berwenang di semua tingkatan sering mempromosikan penggunaan kertas daur ulang – keduanya sedikit banyak

berpengaruh untuk menurunkan permintaan akan kayu yang kemungkinan ditebang secara liar. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian, termasuk Michigan, Vermont dan Massachusetts, dan beberapa pemerintah lokal, memiliki kebijakan pengadaan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber kayu dan produk kayu yang lestari, biasanya diartikan sebagai produk yang terdaftar dalam skema sertifikasi. Di Kanada, walaupun tidak mewajibkan, pemerintah federal mempromosikan penggunaan kayu daur ulang dan lestari dalam gedung pemerintahan yang baru maupun yang sudah lama, dan mengembangkan kebijakan pengadaan ramah lingkungan yang lebih luas.

Pada bulan April 2006, Jepang mengadopsi kebijakan pengadaan ramah lingkungan yang baru, yang mencantumkan prasyarat bahwa semua kayu dan produk-produknya harus dipanen secara legal dan konsisten dengan prosedur hukum perhutanan negara penghasil kayu dan kayu diambil dari hutan yang dikelola secara lestari. Verifikasi bagi kriteria ini bisa melalui skema serifikasi atau metode lain yang ditetapkan oleh perusahaan atau rantai penanganan. Baru-baru ini, Selandia baru, Norwegia, dan secara kurang resmi, Australia, telah memulai mendalami opsi untuk menghapus kayu ilegal dari pasar mereka, khususnya kemungkinan mengembangkan kebijakan pengadaan publik.

1.2.4. TREN SEKTOR RANTAI PASOKAN SWASTA

Pertanyaan kunci dari semua kebijakan-kebijakan pemerintah ini adalah sejauh mana kebijakan ini mengubah kebiasaan perusahaan di sektor swasta yang sebenarnya memasok mereka. Langkah pemerintah bukanlah satu-satunya penggerak yang bertindak atas nama pemasok; mereka juga harus responsive kepada khalayak umum dan tekanan-tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat dan permintaan perubahan dari konsumen akhir mereka, swasta maupun pemerintah. Sekelompok kecil namun jumlahnya semakin meningkat di sektor swasta Inggris, misalnya, secara aktif merespon sinyal-sinyal kebijakan dan perubahan pasar yang mendorong verifikasi pengesahan dan sertifikasi kayu lestari. Respon ini diwujudkan dalam aksi individual dan inisiatif kelompok, tapi beberapa tren dapat diidentifikasi:

- Perpindahan dari pernyataan kebijakan menjadi kepatuhan dan prosedur verifikasi.
- Rasionalisasi jaringan pemasok dan integrasi vertikal yang semakin erat.
- Berpindah dari pasar spot ke kontrak pasokan yang lebih lama.
- Perpindahan dari penilaian resiko berbasis negara menjadi penilaian resiko berbasis pemasok.
- Pengakuan bahwa verifikasi mandiri adalah penting bagi kredibilitas klaim.
- Pembangunan koalisi maju sepanjang rantai supply..
- Pembangungan koalisi maju dengan pemain di negara-negara lain.

Perusahaan perseorangn dengan pandangan jangka panjang di sektor ini, khususnya bagi mereka yang mempertaruhkan reputasi mereka melalui merek ternama dan usaha eceran, telah mengembangkan kebijakan yang secara eksplisit mengikat mereka untuk hanya membeli kayu dan produk kayu legal. Ada sebuah tren yang nyata ke arah pelaksanakan dan verifikasi komitmen ini. Kebanyakan perusahaan yang belum mengembangkan mekanisme verifikasi, paling tidak, menyadari kredibilitas kebijakan mereka bergantung pada mereka sendiri dalam jangka menengah sampai jangka panjang.

Selain menunjukkan kepatuhan hukum dalam operasional mereka, perusahaan semakin menaruh perhatian pada resiko reputasi terkait dengan pemasok mereka. Beberapa perusahaan telah merespon dengan mengurangi jumlah pemasok dan membeli produksi total suatu kegiatan dalam periode waktu untuk menyesuaikan produksi dengan quota yang diwajibkan. Namun, pada jangka panjang, banyak yang menganggap menangani resiko ini secara sistematis akan membutuhkan investasi yang besar dalam sistem rantai penanganan, dan akibatnya semakin mempertimbangkan keuntungan integrasi vertikal. Tren ini sejalan dengan perkembangan di sektor sumber daya alam lain, yang didorong oleh perbaikan dalam teknologi dan komunikasi pengelolaan rantai pemasok dan kemungkinan

meningkatkan efisiensi. Jarang ada kesepakatan antara perusahaan perorangan mengenai isu-isu seperti definisi legalitas, frekuensi audit yang terpercaya atau metode penilaian barang bukti. Selain itu kapasitas internal di beberapa perusahaan terbatas dan begitu pula kemampuan mereka untuk menyelesaikna masalah-masalah ini, paling tidak untuk jangka pendek.

1.2.5. RENCANA AKSI PERDAGANGAN KAYU

Rencana Aksi Perdagangan Kayu (The Timber Trade Action Plan (TTAP)) didirikan dari kolaborasi federasi perdagangan kayu Inggris dan Belanda yang ada di Indonesia. Rencana ini merupakan program lima tahunan, dibiayai sebagian besar oleh EU Tropical Forest Budget di tahun 2005, yang beroperasi di lima negara produsen (Indonesia, Malaysia, Kamerun, Gabon dan Congo Brazzaville) dan tiga negara konsumen (Belgia, Belanda dan Inggris). Tujuannya untuk membangun panduan nasional bagi legalitas dan standarisasi untuk rantai penanganan dan audit, dan untuk memverifikasi legalitas bagi sedikitnaya 20 persen kayu yang dibeli oleh para anggota federasi di Inggris, Belanda dan Belgia dari negara produsen peserta, sebelum tahun 2009. Rencana Aksi ini sedang diimplementasikan oleh Tropical Forest Trust dan federasi-federasi perdaganan tersebut diatas, bekerjasama dengan GFTN. Rencana ini terfokus pada persyaratan konsumen dalam pasar tiga federasi itu dan beroperasi pada tingkat bisnis-ke-bisnis. Persyaratan legalitas sejalan dengan rancangan lisensi legalitas FLEGT di negara produsen tersebut.

1.3. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NEGARA PESAING REGIONAL

1.3.1. CINA

Dua negara pesaing regional bagi Indonesia adalah Cina dan Vietnam. Negara-negara ini juga melihat adanya tuntutan yang meningkat akan pengadaan yang bertanggungjawab bagi produk-produk kayu. Kesadaran bahwa sumber daya hutan pada kenyataan terbatas sehingga harus dicari beberapa bentuk manajemen perhutanan yang lestari. Cina adalah pemain besar dalam pasar produksi hutan global, baik sebagai produsen maupun konsumen. Pasar Cina untuk industri kayu, bubur kertas, dan kertas adalah terbesar kedua di dunia, yang hanya dikalahkan oleh pasar raksasa Amerika Serikat. Cina memiliki sumber hutan yang relatif tebatas dan potensi besar untuk meningkatkan konsumsi kayu dan produk-produk kertas.

Tingkat produksi kayu domestik Cina terus menurun sejak tahun 1995. Di banyak daerah, eksploitasi berlebihan sumber daya hutan selama puluhan tahun telah mengikis volume produksi kayu. Penolakan dan pengetatan kayu gelondongan yang diterapkan setelah banjir Sungai Yangtze yang dahsyat pada tahun 1998 semakin mengurangi produksi, terutama di beberapa wilayah yang hutannya masih memiliki kayu yang banyak. Meskipun kematangan perkebunan hutan domestic akan membantu menjembatani kesenjangan antara pasokan dan permintaan domestic, Cina diperkirakan akan terus mengalami kekurangan kayu yang gawat dalam beberapa decade ke depan. Impor telah meningkat secara besar-besaran dan akan terus bertambah untuk memenuhi permintaan.

Saat ini, kebanyakan impor kayu ke Cina berasal dari negara yang banyak memiliki masalah, misalnya pembalakan liar dan kejahatan hutan, hilangnya hutan alami karena pertanian dan silvikultur, hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk ancaman pada spesies terancam punah seperti gajah dan harimau, gorilla dan orangutan. Cina adalah importer besar produk Rusia, Indonesia, dan Afrika Tengah, negara di mana mayoritas kayu yang diekspor ditebang atau diekspor secara ilegal. Lembaga pemerintah, akademisi dan ahli kehutanan di Cina saat ini sedang mengembangkan standard dan sistem certifikasi untuk Cina. Menurut peraturan baru semua ini memerlukan persetujuan dari Komite Akreditasi Nasional Cina. Untuk mendapat kepercayaan pasar, mereka juga perlu memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan di dunia internasional akan standar sosial dan lingkungan yang berasaskan kinerja, penilaian independen dan transparansi.

Sertifikasi hutan memberikan Cina cara untuk keluar dari pelarangan penebangan tahun 1998 yang diterapkan di seluruh negeri oleh pemerintah pusat setelah banjir tahun 1998. The International Board of Directors of the Forest Stewardship Council (FSC) telah mengumumkan akreditasi Kelompok Kerja Sertifikasi Hutan di Cina sebagai Inisiatif Nasional FSC yang resmi di Cina (FSC Cina) Aktifitas utamanya adalah mempromosikan sertifikasi Rantai Penanganan (Chain of Custody) FSC untuk industri pengolahan kayu dan mendorong pengembangan standard FSC nasional di Cina. Sertifikasi Chain of Custody FSC di Cina tumbuh lebih cepat di banding di negara lain di seluruh dunia. Sampai saat ini lebih dari 300 perusahaan di Cina memegang sertifkasi FSC dengan lebih dari 700.000 hektar hutan yang memiliki sertifkasi FSC.

1.3.2. VIETNAM

Di Vietnam menurut statistik FAO (2000), tututan hutan besarnya 9,8 juta hektar, atau sekitar 30 persen dari wilayah daratan. Sekitar 24 juta hidup di atau sekitar hutan menggantungkan diri mereka pada hutan untuk makanan dan usaha. Namun sayangnya, pengikisan hutan dan penebangan yang tidak terperbaharui selama berpuluh-puluh tahun telah mengurangi tingkat tutupan hutan dari 43 persen pada tahun 1943 menjadi 23,3 persen pada than 1983. Sebagian besar hutan alami yang tersisa berada di daerah dataran tinggi (Tay Nguyen) atau Vietnam tengan dan tenggara. Di Vietnam, hutan dimiliki oleh negara, dikelola dan diawasi oleh Perusahaan Hutan Negara (SFE). Tugas SFE berfokus terutama pada produksi kayu komersial, tanpa memberikan perhatian yang layak pada kelestarian jangka panjang hutan. Selain itu, etnik minoritas yang tinggal di daerah hutan dan petani pindahan dari daerah delta memberikan peranan dalam pengikisan hutan.

Sebagai respon atas krisis yang disebabkan oleh penebangan yang tidak lestari, pada bulan Juli 1997 pemerintah memutuskan untuk sementara waktu membatasi penebangan di hutan alami yang tersisa dan menekankan pentingnya perlindungan yang lebih besar dan kegiatan penanaman kembali. Sejak tahun 1997, penebangan telah berkurang secara signifikan, sampai-sampai hanya 105 dari 241 perusahaan SFE diijinkan untuk tetap menebang hutan alami. Untuk memenuhi permintaan kayu yang terus naik, pemerntah mulai mencari teknik manajemen baru untuk memperbaiki pengelolaan hutan alami. Sambil tetap berhati-hati, pemerintah juga menerapkan strategi sertifikasi hutan pihak ketiga sebagai wahana untuk pengelolaan hutan yang betanggung-jawab dan menghentikan pengikisan hutan.

Pada awal tahun 1998, Kelompok Kerja Nasional Vietnam untuk Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Hutan (NWG) didirikan untuk mengembangkan serangkaian standard nasional untuk SFM berdasarkan prinsip dan kriteria dari Forest Stewardship Council (FSC). Dengan dukungan teknis dan keuangan dari WWF dan proyek bersama GTZ/Kementrian Pertanian dan Reformasi Pembangunan Daerah Pedesaan dari Striktur Administrasi Kehutanan (REFAS), NWG telah menyelesaikan rancangan kriteria dan indikator untuk SFM. Usaha pada tingkat lokal membantu meningkatkan kesadaran pejabat provinsi dan pengelola hutan tentang manfaat SFM dan sertifikasi. Saat ini FSC adalah satu-satunya program sertifikasi yang aktif di Vietnam. Inisiatif untuk mengembangkan Standard Pengelolaan Hutan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi hutan masih terus berlangsung.

1.4. KESIMPULAN

Pembalakan liar mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sosial yang serius dan juga menimbulkan kerugian pada pemerintah sebesar 15 milyar dollar Amerika setiap tahun akibat hilangnya pendapatan. Hal ini diakui dalam KTT G8 pada tahun 1998, yang membahas usaha untuk mengatasi pembalakan liar dan mengadopsi secara resmi "Program Tindakan untuk Hutan". Pada bulan April 2002, Uni Eropa menjadi tuan rumah lokakarya internasional untuk membahas bagaimana UE dapat memberikan sumbangan pada usaha untuk memerangi pembalakan liar. Pada KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburd pada tahun yang sama, UE mengetengahkan komitmen yang kuat untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu

ilegal yang terkait. UE menerbitkan proposal pertamanya untuk rencana aksi FLEGT pada bulan Mei 2003. Sejumlah inisiatif lain, berawal dari komitmen baik pada tingkat nasional maupun internasional, terus bermunculan bersamaan. Yang menonjol ditetapkannya tiga proses FLEG (Penindakan Hukum dan Penataan Hutan, Forest Law Enforcement and Governance) di Asia Tenggara, Afrika (AFLEG) dan Eropa dan Asia Utara (ENAFLEG). Proses ini, yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia, menghasilkan komitmen menteri untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan untuk memerangi pembalakan liar di wilayah masing-masing.

Saat ini proses FLEGT memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. FLEGT VPA dan skema perijinan hukum terkaitnya sedang dirundingkan oleh UE dan pemerintah Indonesia pada saati tulisan ini dibuat. Sistem hukum UE yang baru akan mewajibkan otoritas pabean UE untuk menolak masuknya produk yang tidak berlisensi dari negara mitra. Produk yang tidak berlisensi maksudnya adalah barang-brang yang tidak diberi lisensi berdasarkan skema-skema lisensi legal VPA terkait. Pada tahap awal skema lisensi hanya mencakup produk terbatas – kayu mentah, kayu yang digergaji, kayu lapis dan venir – tapi ada rencana untuk mengembangkannya ke produk-produk lain secapat mungkin dan diperkirakan akan juga meluputi furnitur. Bersamaan dengan peraturan baru UE dan banyak lagi inisitif lainnya yang sedang dikembangkan dan disebut dalam laporan ini, semakin penting untuk memastikan produk hutan diproduksi secara legal dan lestari di Indonesia. Ini adalah saat penting bagai sektor produksi hutan Indonesia untuk menempatkan diri dalam posisi untuk memenuhi permintaan baru ini.

Sebagai salah satu produsen kayu terbesar di dunia, Indonesia akan semakin dituntut untuk menunjukkan bahwa produk hutannya diambil dari sumber yang tidak melanggar hukum. Hal ini akan memerlukan definisi hukum yang pada saat laporan ini ditulis sedang dilaksanakan di bawah pengawasan program FLEGT. Dengan pelaksanaan ini, diperlukan adanya skema lisensi pihak ketiga yang memiliki reputasi baik. Skema ini akan menjadi aktifitas dasar yang diasosiasikan dengan FLEGT VPA. Skema ini akan mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan penilaian pihak ketiga untuk menunjukkan bukti bahwa bahan baku didapatkan dari sumber yang legal dan perusahaan memiliki skema pelacakan kayu yang memadai.

Verifikasi sumber legal pihak ketiga adalah fokus dari proyek SENADA. Pengembangan institusional definisi hukum dan skema perijinan telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Saat ini verifikasi pihka ketiga lebih banyak dilaksanakan oleh badan sertifikasi hutan internasional yang dapat memberikan sertifikat sumber legal yang memiliki reputasi. Untuk bekerja dengan badan sertifikasi internasional perusahaan wajib memahami persyaratan akan serangkain standard dan bagaimana memenuhi standard itu. Hal ini memerlukan latihan dan dukungan tingkat tinggi. Program SENADA berada dalam posisi ideal untuk memberikandukungan ini untuk memastikan sektor produksi furnitur di Indonesia dapat mencapai tingkat pemahaman dan kompetensi yang dibutuhkan.

Bersamaan dengan dinegosiasikannya FLEGT VPA, UU Lacey Amerika juga semakin diperkuat dan kebijakan pengadaan dilaksanakan, pasar internasional akan semakin menuntut bukti legalitas dan kelestarian. Dengan dukungan program SENADA perusahaan furnitur di Jawa tengah akan siap untuk memenuhi permintaan baru ini dan mampu bersaing secara lebih agresif di pasar funitur internasional.

2. STRATEGI UNTUK PERAN SERTA SENADA

Konsep daya saing pasar melalui kebijakan pengadaan kayu yang lebih baik bermula dari semakin tingginya permintaan akan produk yang diverifikasi secara legal dan bersertifikat. Melalui misi ini SENADA telah merencanakan dan mengembangkan aktifitas program yang akan membantu sektor furnitur kayu Indonesia untuk mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar internasional. Hal ini akan dilakukan melalui usaha untuk pengadaan kayu yang bertanggungjawab dan memastikan semua pasokan bahan baku telah dicap legal pada titik asalnya.

Strategi dasar dari program ini akan membantu sekelompok terpilih pengusaha furnitur melalui program verifikasi legal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengekspor ke pasar yang peduli lingkungan. Program ini akan mensosialisasikan kesuksesan ini pada sektor furnitur sebagai bagian dari usaha advokasi yang lebih luas tentang pentingnya sertifikasi pasar hijau. Berikut ini usulan strategi penting dan alasan dikutsertakannya dalam proposal rancangan proyek.

2.1. STRATEGI KUNCI DAN ALASAN

2.1.1. IDENTIFIKASI PERUSAHAN YANG DICALONKAN

Kebutuhan dasar dari program ini adalah identifikasi klien dari sektor furnitur kayu yang memiliki potensi and kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan pengadaan untuk mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar mereka melalui verifikasi legal. Program ini perlu mengidentifikasi dan memberikan peringkat pada klien berdasarkan mereka yang memiliki kemampuan untuk mencapai standard yang diperlukan secara cepat dan yang maju dalam pendekatan mereka, dan perusahaan yang memerlukan usaha dan waktu untuk mencapai persyaratan yang diperlukan. Masalah utama yang perlu dipertimbangkan adalah kompleksitas rantai pasokan. Hal ini penting terutama di Jawa karena banyak rantai pasokan perusahaan furniture sangat terkait dengan pedagang dan perusahaan sub-kontrak yang digunakan untuk memperoleh bahan mentah.

2.1.2. DUKUNGAN KLIEN

Dukungan dari klien yang teridentifikasi merupakan aspek yang sangat penting dari program ini. Membutuhkan waktu yang lama dan usaha untuk mengubah system rantai penanganan yang bekerja secara bisnis menjadi system yang memenuhi syarat penilaian pihak ketiga akan standard pengadaan lingkungan internasional. Cara yang terbaik dan tercepat bagi SENADA untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan konsultan berpengalaman dan ahli. Perusahaan ini akan dapat memasok dukungan secara terus-menerus untuk memastikan perusahaan mampu beradaptasi dengan prosedur untuk memenuhi standard lingkungan internasional.

2.1.3. MENGIDENTIFIKASI MITRA ORGANISASI (PEMBERI DANA, LSM DAN BADAN SERTIFIKASI)

Mempertahankan dan medorong kemitraan dengan donator, LSM dan sektor swasta merupakan hal yang penting. Keterlibatan masyarakat pemberi dana telah semakin meningkat dalam sektor kehutanan dan produk hutan di Indonesia. Dengan semakin sadarnya akan pengikisan hutan Indonesia dan dampak dari pembalakan liar, donator semakin meningkatkan bantuan dan jumlah proyek dalam sektor ini. Oleh karena itu penting bagi SENADA untuk mempertahankan kontak dengan mereka.

Selain itu, LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan dan pelestarian alam telah menjadi mitra penting bagi donatur dalam mengembangkan analisis tentang masalah kehutanan dan memberikan sumbangan pada proses dialog yang sedang berlangsung (mis. Forest Watch Indonesia, TNC, dan

WWF Indonesia). Beberapa LSM telah mengembangkan kemitraan konstruktif dengan Departemen Kehutanan dalam hal masalah penataan (mis. Indonesian Corruption Watch and Greenomics). Oleh karena itu ini merupakan sektor yang penting bagi SENADA untuk terlibat dan memajukan kemitraan yang bermanfaat untuk membantu programnya. Akhirnya, penting bagi SENADA untuk memelihara hubungan kerja yang erat dengan badan sertifikasi yang dipilih. Hal ini akan memastikan tim SENADA mengetahui persyaratan untuk penilaian dan memastikan bahwa klien SENADA dapat mencapai standard yang diperlukan.

2.1.4. HUBUNGAN PASAR

Tujuan dari proyek SENADA ini adalah untuk memperbaiki daya saing. Oleh karena itu masalah hubungan pasar sangatlah penting. Melalui program ini klien SENADA akan dapat mempertahankan pasarnya dan mendapatkan akses ke pasar yang baru. Bekerja sama dengan proyek yang dilaksanakan oleh donator lain seperti program PENSA dari IFC untuk promosi klien program. Dan untuk akses ke pasar baru di Uni Erope, asosiasi perdagangan kayu UE akan dapat menjadi sumber yang penting.

2.1.5. PELAKSANAAN KERJA ADVOKASI

Menunjukkan kesuksesan program ini pada sektor yang lebih luas akan menjadi sangat penting. Peranan program advokasi juga berfungsi menciptakan dan memelihara hubungan pasar dan mensosialisasikan masalah pembelian yang bertanggungjawab. Advokasi harus dilakukan melalui lokakarya dan iklan promosi yang terfokus. Lokakarya harus dilakukan bersama dengan mitra organisasi untuk membantu mempromosikan pentingnya pengadaan yang bertanggungjawab.

3. PENILAIAN ORGANISASI MITRA POTENSIAL (KELEBIHAN DAN KEKURANGAN)

3.1. PROGRAM SMARTWOOD DARI RAINFOREST ALLIANCE (BADAN SERTIFIKASI)

Program sertifikasi Rainforest Alliance, Smartwood, didirikan pada tahun 1989 untuk mensertifikasi praktek perhutanan bertanggung jawab dan sekarang memfokuskan pada penyediaan sejumlah alat sertifikasi. Untuk meningkatkan efektifitas sertifikasi sebagai alat pelestarian keanekaragaman hayati dan dukungan ekonomi bagi penduduk setempat, Rainforest Alliance juga mendirikan program Training, Research, Extension, Education and Systems (pelatihan, penelitian, perluasan, sistem dan pendidikan. SmartWood bekerja untuk memperkuat rantai pasokan dan membangun tautan pasar bagi kayu dan produk-produk hutan bersertifikat, dengan membantu perusahaan mengikutsertakan kelestarian dalam strategi pengadaan bahan baku mereka.SENADA dapat bekerja dengan Smartwood untuk menyediakan verifikasi legal pihak ketiga yang terpercaya bagi klien-klien.

Kelebihan	Kelemahan
1. Dikenal dunia Internasional. 2. Standard memiliki reputasi baik dan terakreditasi oleh FSC 3. Telah memiliki program verifikasi legal sendiri yang telah diterima pasar. 4. Mereka cukup berpengalaman di Indonesia dalam sertifikasi. 5. Hanya sertifikasi hutan yang menjadi fokus mereka. 6. Sangat baik dalam kapasitas personel di negara mereka beroperasi	1. Tidak dapat memasok jaringan pasar. 2. Mereka tidak dapat bisa menawarkan konsultasi bagi klien perseorangan SENADA. 3. Mereka terkenal lambat dalam merespon masukan dan menulis laporan.

3.2. SGS (BADAN SERTIFIKASI)

SGS QUALIFOR adalah salah satu program sertifikasi terkemuka yang memiliki lebih dari 2000 rantai pengasuhan dan lebih dari 200 sertifikat pengelolaan hutan yang mencakup 20 juta hektar hutan di seluruh dunia. SENADA dapat bekerja dengan SGS untuk memberikan verifikasi legal pihak ketiga bagi klien-klien SENADA.

Kelebihan	Kekurangan
1. Dikenal dunia internasional. 2. Standard memiliki reputasi baik dan terakreditasi oleh FSC 3. sudah memiliki program verifikasi hukum mereka sendiri yang telah diterima pasar.. 4. Mereka cukup berpengalaman di Indonesia dalam hal sertifikasi.	1. Tidak dapat mensuplai lingkaran pasar. 2. Bukan program serifikasi hutan saja yang menjadi fokus mereka. 3. Mereka tidak berbasis di Indonesia. 4. Mereka tidak dapat menawarkan konsultasi bagi klien perseorangan SENADA

3.3. TROPICAL FOREST TRUST

Didirikan tahun 1999, Tropical Forest Trust bertujuan untuk melestarikan hutan tropis yang terancam melalui pengelolaan lestari. TFT bertugas untuk memastikan hutan tropis dikelola untuk masa mendatang dan untuk memaksimalkan nilainya bagi masyarakat, fauna serta lingkungan. TFT mendukung proyek-proyek kehutanan dengan memberikan saran-saran, dan menghubungkan mereka dengan pembeli bertanggung jawab yang berkomitmen pada sumber kayu lestari.Perusahaan-perusahaan anggota TFT berkomitmen untuk mengambil bahan baku kayu dari proyek hutan TFT dan hutan bersertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Organisasi ini didanai terutama dari kontribusi anggotanya, tapi juga dari hibah dan donasi-donasi. SENADA dapat bekerja dengan TFT untuk memberikan dukungan sertifikasi dan jaringan pasar bagi klien-klien SENADA.

Kelebihan	Kelemahan
1. Dikenal dunia internasional. 2. Telah memiliki program verifikasi hukum mereka sendiri yang telah diterima pasar. 3. Mereka cukup berpengalaman di Indonesia dalam hal sertifikasi. 4. Sangat baik dalam kapasitas personel di negara mereka beroperasi. 5. Mereka bisa memberikan pelatihan.	1. Tidak terakreditasi oleh FSC. 2. Ketertautan pasar yang dapat mereka tawarkan ditentukan oleh klien-klien TFT di Eropa. 3. Pemasok di Indonesia tidak bebas berdagang diluar kerangka kerja TFT.

3.4. TROPICAL FOREST FOUNDATION

Tropical Forest Foundation adalah institusi nirlaba yang bersifat mendidik yang mengabdi bagi kelestarian hutan tropis melalui kehutanan lestari. TFF telah dikenal luas berkat model percontohan dan sekolah-sekolah pelatihan untuk menunjukkan manfaat dan mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari maupun penebangan dengan dampat kecil. Di Indonesia, saat ini mereka menyaksikan minat yang meningkat di Eropa akan pengadaan kayu lestari. Dan mereka telah mulai suatu program untuk menyokong pembelian bertanggungjawab. SENADA dapat bekerja dengan TFF untuk memberikan dukungan, serifikasi pihak ketiga dan jaringan pasar bagi klien-klien SeNADA.

Kelebihan	Kelemahan
1. Diakui secara internasional 2. Telah mendirikan program Verifikasi Legal milik mereka sendiri yang diterima oleh pasar. 3. Mereka memiliki pengalaman yang memadai di Indonesia dalam sertifikasi. 4. Mereka bisa membantu menciptakan tautan pasar terbatas. 5. Mereka memiliki kapasitas pegawai yang baik di negara mereka beroperasi. 6. Mereka bisa menawarkan pelatihan.	1. Fokus mereka bukan semata-mata Program 2. Sertifikasi Hutan Standard mereka meski diakui secara internasiona tapi tidak diterima seluas standard CBs

3.5. TUV

TÜV Rheinland Indonesia adalah anggota TUV Rheinland Group, perusahaan terkemuka duni dalam bidang layanan ujicoba dan penilaian. Di Indonesia TUV menawarkan (a) Sertifikasi Hutan (Huta Produksi Alami, Perkebunan Kayu, Pengeloaan Hutan Berbasis Komunitas) dihadapkan pada

standard LEI 5000-1, 5000-2 and 5000-3; (b) Chain of Custody ; (c) Verifikasi Keabsahan Kayu dan Penelusuran Kayu (Verification of Legal Origin). SENADA dapat bekerjasama dengan TUV untuk memberikan dukungan sertifikasi dan sertifikasi pihak ketiga untuk klien SENADA.

Kelebihan	Weaknesses
1. Diakui secara internasional 2. Mereka memiliki pengalaman yang memadai di Indonesia dalam sertifikasi. 3. Mereka memiliki kapasitas pegawai yang baik di negara mereka beroperasi 4. Mereka bisa menawarkan pelatihan	1. Mereka hanya akan memverifikasi terhadap standard VLO organisasi lain 2. Belum jelas sejauh mana pasar mengakui TUV VLO. 3. Mereka tidak bisa menawarkan tautan pasar.

3.6. WWF – GLOBAL FOREST & TRADE NETWORK (GFTN)

The Global Forest & Trade Network (GFTN, Jaringan Hutan dan Perdagangan Global) adalah inisiatif WWF untuk mengakhiri pembalakan liar dan memperbaiki pengelolaan hutan yang berharga dan terancam. Dengan memfasilitasi tautan dagang antara perusahaan yang berkomitmen mencapai dan mendukung kehutanan yang bertanggung jawa, GFTN menciptakan kondisi pasar yang membantu melestarikan hutan dunia dan pada saat yang sama memberikan manfaat sosial dan ekonomi untuk bisnis dan orang yang bergantung pada hutan. SENADA dapat bekerjasama dengan GFTN untuk memberikan dukungan sertifikasi dan tautan pasar bagi klien SENADA.

Kelebihan	Kelemahan
1. WWF jelas diakui dan diterima di seluruh dunia. 2. Program GFTN menawarkan kesempatan untuk tautan pasar.	1. Ada sedikit tindak lanjut dalam kaitan dengan dukungan klien individual. 2. Kapasiras global sebenarnya untuk menciptakan tautan pasar dipertanyakan. 3. Fokus dari programmnya adalah Sertifikasi FSC dan bukan legalitas.

3.7. PENSA (DONOR)

The Program for Eastern Indonesia Small and Medium Enterprise Assistance – PENSA (Program Bantuan Perusahaan Kecil dan Menengah Indonesia Bagian Timur)– dibentuk pada bulan September 2003 dengan tugas memperbaiki kehidupan dan mata pencaharian dengan cara memperluas kesempatan dan kemampuan untuk usaha kecil dan menengah. Program ini memfokuskan pada enam wilayah di mana keuntungan komparatif local bisa diterjemahkan menjadi kentungan komparatif internasional:

- Promosi eksport kerajian
- Tautan rantai pasokan yang lestari
- Tautan agribisnis
- Tautan usaha kecil dan menengah kepada perusahaan minyak gas dan pebambangan
- Akses pada pendanaan untuk usaha kecil dan menengah
- Lingkungan yang memungkinkan bisnis

Yang paling relevan untuk dukungan SENADA terhadao furnitur kayu adalah program tautan rantai pasokan. Progrma ini menciptakan kesempatan kerja di tiga sektor – kehutanan/furnitur, pariwisatan dan perikanan – dengan cara memperbaiki pengelolaan lingkungan dan mendorong kelestarian. Pada khususnya program ini bertujuan membangun pasokan dan pasar untuk produk hutan yang didapat dengan bertangggung jawab dan memperbaiki akses market untuk

furnitur yang dibuat dengan "kayu yang baik." SENADA dapat bekerjasama dengan PENSA untuk mebentuk kemitraan bagi sosialisasi program dan tujuan.

Kekuatan	Kelemahan
1. Mereka memiliki pengalaman di Indonesia dalam bidang sertifikas 2. Mereka dapat membantu dalam menciptakan tautan pasar terbatas 3. Mereka memiliki personel dalam negri yang memadai 4. Mereka menwarkan pelatihan	1. Mereka memfokuskan pada sertifiksi hutan dan promosi tentang FSC peumus dan promosi dari FSC dan dia bukan aslah satu datr progam.. 2. Program-programnya hanya terfokus pada phon akasia Kalimantan, bukan teak dari Jawa. The programs focus is on Acacia from Kalimantan not teak from Java.

3.8. INDONESIAN (NATURAL) RESOURCES INSTITUTE (INDRI)

Indonesian (Natural) Resources Institute adalah organisasi yang didirikan oleh orang-orang yang bekerja dibidang sertifikasi pengelolaan hutan. Organisasi ini adalah afiliasi yang tidak terikat dari individu paruh waktu yang mendirikan INDRI sebagai kendaraan untuk memberikan dukungan pada pasar. ENADA dapat bekerja dengan INDRI untuk memberikan dukunngan konsultasi dan pelatihan bagi klien-klien SENADA.

Kelebihan	Kelemahan
1. Mereka adalah organisasi Indonesia. 2. Mereka berpengalaman dibidang sertifikasi di Indonesia. 3. Mereka menawarkan pelatihan.	1. Mereka tidak memiliki karyawan penuh waktu. 2. Mereka tidak dikenal secara internasional karenanya akan berdampak perbedaan standar dalam sertifikasi. 3. Mereka tidak dapat menerbitkan sertifikat asal kayu dalam bentuk apa-pun. 4. Mereka tidak bisa menawarkan dukungan jaringan pasar.

3.9. GLOBAL FOREST SERVICES

GFS adalah perusahaan konsultasi yang didirikan untuk memberikan solusi berorientasi pasar untuk menyempurnakan pengelolaan hutan dan industri-industri kehutanan secara lestari. GFS bertujuan untuk memberikan solusi yang membantu membuktikan bahwa produk berasal dari sumber bertanggung jawab dan asal-muasalnya dapat dilacak balik ke sumbernya dengan memberikan kliennya bimbingan yang jelas tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan rantai pasokan dari hutan sampai ke toko. SENADA dapat bekerja dengan GFS untuk menawarkan dukungan konsultasi dan pelatihan bagi klien-klien SENADA.

Kelebihan	Kelemahan
1. Mereka berpengalaman dibidang sertifikasi Indonesia. 2. Mereka dapat membantu menciptakan jaringan pasar terbatas. 3. Mereka memiliki personel yang memadai di negara tempat beroperasi. 4. Mereka bisa menawarjan pelatihan.	1. Mereka tidak dikenal secara internasional karenanya akan berdampak perbedaan standar dalam sertifikasi. 2. Mereka tidak bisa menerbitkan sertifikat asal barang

3.10. C8-GLOBAL

C8-global hampir sama dengan GFS yang merupakan perusahaan konsultasi, didirikan untuk memberikan solusi-solusi orientasi pasar untuk menyempaunakan pengelolaan hutan dan industri-industri berdasar kehutanan lestari. C8-Global bertujuan untuk memberikan solusi-solusi yang membantu menunjukkan bahwa produk diambil dari sumber bertanggung jawab dan asalnya dapat dilacak balik ke sumbernya dengan memberikan klien-kliennya bimbingan yang jelas bagaimana cara memenuhi kebutuhan rantai pasokan dari hutan sampai ke toko. SENADA dapat bekerja dengan GFS untuk menawarkan dukungan konsultasi dan pelati han bagi klien-klien SENADA.

Kelebihan	Kekurangan
1. Mereka berpengalaman dibidang sertifikasi Indonesia. 2. Mereka memiliki personel yang memadai di negara mereka beroperasi. 3. Mereka bisa menawarkan pelatihan.	1. Mereka tidak dikenal secara internasional karenanya akan berdampak perbedaan standar dalam sertifikasi. 2. Tidak memiliki kemampuan memberikan bantuan untuk jaringan pasar.

4. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

SENADA memiliki peluang besar untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan dan berarti bagi industri furnitur kayu Indonesia. Kami yakin bahwa pengetahuan dan pendekatan profesional dapat meningkatkan daya saing Industri, membuka peluang penting bagi perusahaan perseorangan, meningkatkan jumlah dan kualitas industri tenaga kerja dan menjadikan pendanaan USAID bermanfaat. Perdagangan internasional produk hutan tengah berada dalam proses transisi ke arah pendekatan pembelian yang bertanggung jawab. Sektor furnitur Indonesia hanya bernilai 6 persen dari perdagangan internasional. Karenanya untuk meningkatkan persentase, sektor ini harus segera memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat akan pengadaan produk bertanggung jawab. Berikut ini adalah garis besar tindakan yang diperlukan untuk memastikan klien SENADA siap untuk memenuhi persyaratan akan bukti yang diminta oleh pembeli dari Amerika Serikat dan Eropa bahwa produk mereka berasal dari sumber yang legal.

4.1. RENCANA KERJA

4.1.1. BERHUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KONSULTASI

Ada kebutuhan untuk menggunakan perusahaan-perusahaan konsultasi untuk memastikan bahwa perajin furnitur dapat memenuhi standard untuk memiliki verifikasi sumber yang legal. Kapasitas SENADA sendiri tidak sepadan dengan persyaratan VLO sehingga dibutuhkan sebuah perusahaan konsultan yang memiliki reputasi. Ada tiga calon potensial yaitu INDRI, Global Forest Services dan C-8 Global. Kelemahan dan kelebihan masing-masing telah dibahas dalam Bab III. Tim SENADA telah memutuskan bahwa INDRI akan dikontrak untuk membantu klien-klien SENADA

4.1.2. BEKERJA DENGAN PERUSAHAN KONSULTASI UNTUK MEMVERIFIKASI KLIEN PERTAMA

Tahap perencanaan awal program furnitur kayu SENADA mengidentifikasi klien yang memerlukan VLO sesegera mungkin. Semua perusahaan-perusahaan ini telah diminta VLO dari klien-klien mereka. Perusahaan-perusahaan ini diperingkat "rumit" dan "agak rumit" dalam rantai suplai. Rantai suplai yang agak rumit akan ditargetkan lebih dulu untuk didukung dan yang rumit dikemudian hari. Peringkat klien yang dipilih adalah sebagai berikut PT. Wisanka, PT. Acacia, CV. Mekar Jati dan PT. Hartco. Klien-klien ini sekarang perlu memiliki dukungan intensif untuk memiliki VLO sebelum akhir September 2007. INDRI telah dikontrak untuk menyelesaikan tugas ini serta jadwal kerja mendalam yang diberikan. SENADA harus saat ini juga memastikan bahwa jadwal kerja ini diikuti dan klien mendapatkan dukungan yang memadai. Tingkat dukungan harus mencakup verifikasi pedagang pemasok dan unit pengelolaan hutan asli, bukan hanya administrasi internal perusahaan.

4.1.3. TERUS MENGKAJI ULANG KOMPETENSI DAN KUALITAS PERUSAHAAN KONSULTANSI

Kesusksesan program ini terutama bergantung pada kompetensi perusahaan konsultansi. Pada saat penulisan ini INDRI telah dikontrak sebagai perusahaan konsultan. Pekerjaan INDRI dan perusahaan konsultan lain harus secara teratur dikaji untuk memastikan klien-klien SENADA mendapatkan dukungan yang sepantasnya.

4.1.4. KAJI DAN EVALUASI BADAN SERTIFIKASI TERPILIH

Tim SENADA harus selalu ingat bahwa banyak lembaga sertifikasi dan organisasi sertifikasi lain yang dapat menyediakan VLO yang memiliki reputasi di pasar. Pada saat penulisan, lembaga sertifikasi yang terpilih untuk proyek ini adalah SmartWood. Hal ini perlu untuk terus dikaji ulang dan

profesionalisme dan kecepatan umpan balik dipertimbangkan. Lembaga sertifikasi terpilih tidak hanya menjalankan penilaian namun juga harus meberikan umpan balik yang benar dan tepat untuk semua kliennya. Jika hal ini tidak dilakukan maka tim SENADA harus mempertimbangkan untuk mengganti lembaga sertifikasi untuk sisa waktu program.

4.1.5. PILIH KLIEN LEBIH LANJUT UNTUK DIBANTU DAN KONTAK PERUSAHAAN KONSULTANSI

Proyek SENADA saat ini memiliki 18 klien. Tahap awal proyek ini adalah untuk mendapatkan empat sertifikasi VLO di bulan September. Dengan memperkirakan bahwa tugas ini telah selesai maka tim SENADA perlu memulai memberikan peringkat pada 14 klien yang tersisa berdasrkan dengan rantai pasokan yang rumit dan yang agak rumit.Setiap waktu tim SENADA harus lebih mempertimbangkan sumber bahan mentah daripada masalah administrasi internal dalam lokasi pabrik.

4.1.6. MEMFASILITASI TAUTAN PASAR UNTUK KLIEN SENADA

Selama proses membantu klien untuk mendapatkan VLO, tim SENADA perlu memulai kerjasama dengan lembaga donor lain dan sektor swasta untuk menciptakan rantai hubungan pasar.Sebgai contoh sebuah lembaga donor yang akan menambahkan nilai adalah program PENSA dari IFC. Program kerja PENSA melengkapi program ini dan ada banyak dinergi di sana yang terbukti bermanfaat untuk penciptaan tautan pasar.Selain itu juga SENADA harus mulai sebuah dialog dengan Federasi Perdagangan Kayu (Timber Trade Federation) di tiap-tiap negara Eropa. Federasi ini menyokong pembuatan kebijakan pengadaan pemerintah dan swasta yang bertanggung jawab sehingga akan menjadi mitra yang baik dalam menciptakan hubungan pasar.

4.1.7. LAKUKAN KAMPANYE SOSIALISASI

Ada kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan advokasi. Klien-klien awal yang telah diidentifikasi SENADA seluruhnya telah sadar mengenai perubahan yang akan datang. Namun banyak pengerajin Indonesia yang tidak sadar akan perubahan kebijakan pengadaan dan peraturan yang tertulis di Eropa. Perubahan-perubahan ini perlu dijelaskan melalui berbagai kampanye kasadaran masyarakat.

4.2. JADWAL RENCANA PELAKSANAAN

Tindakan	2007				
	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Penunjukkan Perusahaan Konsultan					
Perkenalan Perusahaan kpd Konsultan					
Konsultan bekerja dengan seluruh klien untuk bagia pertama dukungan					
Penilaian latihan untuk semua klien - Senada/konsultan					
Penilaian SmartWood					
SENADA mengkaji perusahaan konsultansi					
SENADA mengkaji perusahaan CB					
Memilih klien untuk dukungan tahap 2					
Hubungi perusahaan konsultasi untuk dukungan tahap 2					
Konsultan bekerja dengan semua klien untuk dukungan tahap 2					
Badan sertifikasi melakukan penilaian					

Tindakan	2008											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Badan sertifikasi melakukan penilaian												
Hubungi perusahaan konsultan untuk dukungan tahap 3												
Fasilitasi untuk hubungan pasar												
Kampanye sosialisiasi												
Konsultan bekerja dengan semua klien untuk dukungan tahap 3												
Badan sertifikasi melakukan penilaian												

Tindakan	2009								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
Fasilitasi Lingkaran pasar									
Kampanye Sosialisasi									

5. KEGIATAN-KEGIATAN PELAKSANAAN

Bagian berikut akan membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama misi ini untuk merancang program SENADA untuk meningkatkan penetrasi furnitur kayu Indonesia terhadap pasar ramah lingkungan melalui implementasi verifikasi lacak balak (Verification of Legal Origin). Tahap desain misi berlangsung dari May sampai July dan langkah-langkah yang akan diambil meliputi:

- Pertemuan dan pelatihan tim awal tentang legalitas dan sertifikasi di sektor kehutanan.
- Lokakarya advokasi pengenalan SENADA
- Pertemuan mitra potensial.
- Penilaian analisa kesulitan klien perorangan dan pembuatan rencana aksi.
- Dokumentasi dan sumber-sumber yang tercipta

Kegiatan di atas dilakukan untuk mengenalkan konsep kepada tim SENADA, mengenalkan ide pada calon klien di lapangan dan kemudian mengenali mitra potensial bagi SENADA. Selama proses berlangsung semakin jelaslah bahwa sejumlah klien telah diminta verifikasi legal dari klien Uni Eropa mereka. Sehingga memungkinkan selama tahap perencanaan untuk melakukan tugas analisa masalah dan membuat rencana aksi baru bagi para perajin ini.

5.1. PERTEMUAN AWAL TIM DAN PELATIHAN TENTANG LEGALITAS DAN SERTIFIKASI PADA SEKTOR KEHUTANAN

Konsep sertifikasi hutan dan berikutnya rantai sertifikasi penanganan untuk pelacakan produk dan bahan mentah telah ada di pasar sejak awal 1990-an. Namun demikian karena kesulitan yang dihadapi untuk mensertifikasi hutan, khususnya di daerah tropis, ada kebutuhan untuk menciptakan dan langkah segera untuk memastikan pasokan kayu yang legal ke pasar. Program SENADA diposisikan pada proses berkembang ini. Tim SENADA, meskipun memiliki pengalaman dalam sektor manufaktur dan pasar memiliki pengetahuan yang sedikit tentang industri kehutanan, proses sertifikasi dan legalitas serta nuansa-nuansanya.

Karena itu penting adanya untuk memberi pengetahuan pada tim tentang perkembangan sertifikasi hutan dan legalitas. Mulanya rapat tim di bulan Mei diadakan, pada pertemuan ini dijelaskan masalah-masalah sertifikasi dan bagaimana posisi verifikasi legal asal barang dalam kerangka ini dan kenapa. Selain sesi pelatihan awal, penting untuk berkerja sama dengan tim dan anggota tim selama proses desain proyek berlangsung. Banyak sesi pelatihan individu yang kecil diadakan untuk mengkonsolidasi apa yang telah dijelaskan dan menjawab pertanyaan anggota tim pada saat yang sama mereka melalui proses verifikasi legalitas.

5.2. LOKAKARYA ADVOKASI PENGENALAN SENADA

Pada awal proses empat lokakarya diadakan di Jepara, Semarang, Surabaya dan Pasuruan. Kemudian pada bulan Juli tahap kedua advokasi diadakan di Malang, Solo, Klaten dan Yogyakarta. Lokakarya ini diadakan untuk memperkenalkan program verifikasi legalitas SENADA kepada pengusaha furnitur di wilayah tersebut, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha setempat seperti ASMINDO dan masyarakat luas. Kesemuanya dari lokakarya ini dihadiri oleh banyak peserta dengan sekitar 10 sampai 15 potensial klien baru bagi SENADA dalam tiap-tiap lokakarya itu.

Minat pada program ini sangat besar dan semua peserta meminta untuk turut serta dalam program ini. Formulir pendaftaran SENADA dibuat untuk membantu mengevaluasi calon klien yang dibagikan selama pertemuan tersebut. Responnya memungkinkan tim SENADA untuk mengevaluasi semua

pelamar dan memilih yang terbaik yang berjumlah 18 klien untuk program ini. Tim juga dapat mengidentifikasi dari 18 klien baru empat yang memiliki potensi untuk mendapatkan dan memerlukan verifikasi legal secepatnya. Dijelaskan oleh klien kepada tim bahwa pelanggan mereka dai Eropa terutama di Inggris sudah meminta verifikasi legal produk mereka.

5.3. PERTEMUAN CALON MITRA

Kerja program SENADA akan tergantung pada mitra-mitranya. Program ini akan memerlukan berbagai mitra mulai dari perusahaan konsultan untuk membantu pelatihan klien, sampai lembaga sertifikasi pihak ketiga. Selain itu SENADA perlu bermitra dengan organisasi donor lain yang bekerja dalam bidang ini untuk membantu dalam hal hubungan pasar dab advokasi. Selama tahap desain mitra potential terus dicari. Bab III memuat daftar mitra yang dipertemukan beserta kelebihan dan kekurangan mereka dibandingkan dengan apa yang mereka tawarkan kepada program.

Diputuskan bahwa untuk penilaian VLO pihak ketiga Smartwood merupakan pilihan terbaik untuk menjadi mitra. Keputusan ini berdasarkan fakta bahwa mereka memiliki reputasi internasional terbaik dan karena itu sertifikat mereka akan diterima oleh pasar. Mereka paling banyak memiliki pengalaman di Indonesia dalam hal sertifikasi dan mereka yang paling profesional dalam hal proses dan prosedur, penilaian serta audit.

Perusahaan konsultansi yang dipilih untuk membantu klien melaksanakan system rantai penanganan yang kuat adalah INDRI. Keputusan ini dibuat karena INDRI adalah perusahaan lokal Indonesia dan karena itu dipandang sebagai pilihan terbaik oleh tim SENADA. Akan halnya mitra lainnya seperti donor, masih harus diputuskan. Namun demikian PENSA dianggap sebagai pilihan logis untuk membantu pemasaran dan program sosialisasi dan karena itu harus didekati manakala SENADA akan bergerak kearah itu.

5.4. PENILAIAN ANALISIS MASALAH KLIEN INDIVIDU AND PEMBUATAN RENCANA AKSI

Proyek SENADA melalui lokakarya advokasi awal memilih 18 klien untuk melalui prosedur VLO. Kemudian diputuskan untuk membuat peringkat klien ini kedalam kelompok rantai pasokat rumit dan rantai pasokan mudah. Melalui pemeringkatan ini muncul daftar 4 perusahaan - dua perusahaan di daerah Semarang, satu di Solo dan 1 di Surabaya. Keempat perusahaan tersebut akan diusahakan untuk mendapatkan sertifikat VLO sesegera mungkin. Waktunya adalah akhir September 2007. Untuk mempercepat proses ini analisis celah pra-penilaian dilakukan pada keempat perusahaan itu. Rencana aksi kemudian dirancang dari celah yang diindentifkasi dalam pra-penilaian dan kemudian dipresentasikan kepada klien.

Tim SENADA membuat kunjungan tindaklanjut rencana aksi ini satu kali seminggu untuk memastikan kepatuhan dan kemajuan. Selama kunjungan ini dimungkinkan dilakukan pelatihan untuk klien tentang prosedur rantai penanganan dan memberikan mereka dokumen prosedur generik. Dua isu terbesar bagi semua klien adalah kebutuhan untuk memastikan semua penghantaran ke pabrik mereka disertai dokumen transportasi yang lengkap.

Kedua adalah kebutuhan untuk dapat menelusuri dari titik penjualan produk jadi ke blok pengelolaan hutan di mana kayunya berasal. Paket prosedur generik akan membantu perusahaan menyesuaikan system rantai penanganan mereka saat ini dengan persyaratan VLO dan memungkinkan mereka menelusuri balik dari titik penjualan produk ke bahan baku yang mereka gunakan.

5.5. INFORMASI SUMBER DAN BAHAN

Selama periode rancangan misi, informasi sumber dan bahan-bahan disediakan untuk tim SENADA. Bahan-bahan sumber dibuat untuk memungkinkan tim SENADA bekerja dengan klien mereka dan memahami proses yang terlibat dan memastikan klien yang dipilih memiliki potensi untuk mencapai VLO. Bahan-bahan yang dibuat adalah sebagai berikut:

- **Formulir aplikasi klien SENADA.** Formulir ini dikeluarkan untuk calon klien sehingga mereka bisa memberikan SENADA informsi relevan yang diperlukan untuk mengevaluasi potensi klien untuk mendapatkan VLO.

- **Kerangka Evaluasi Klien SENADA (go, no go).** Formulir evaluasi dibuat untuk digunakan bersamaan dengan formulir aplikasi. Formulir evaluasi adalah kerangka untuk digunakan untuk menilai pelamar. Hasilnya akan memberikan gambaran pada tim SENADA apakah perusahaan pelamar adalah pelamar yang layak untuk ikut program.

- **Template laporan pra-penilaian VLO SENADA and ceklis.** Template laporan pra-penilaian VLO dibuat dari standard SmartWood dan persyaratan ceklis SmartWood. Template ini digunakan sebagai analisis celah dan alat pengembangan rencana aksi.

- **Kerangka prosedur Rantai Penanganan SENADA.** Kerangka prosedur Rantai Penanganan dibuat untuk digunakan sebagai sumber untuk digunakan oleh klien sebagai panduan untuk menciptakan system rantai penanganan yang kuat yang taat pada persyaratan verifikasi pihak ketiga.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

SENADA memiliki peluang besar untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan dan berarti bagi industri furnitur kayu Indonesia dengan mendukung sektor ini untuk memperbaiki pengadaan bahan baku melalui VLO. Kami yakin bahwa pengetahuan dan pendekatan profesional dapat meningkatkan daya saing industri, membuka peluang penting bagi perusahaan perseorangan, meningkatkan jumlah dan kualitas industri tenaga kerja dan menjadikan pendanaan USAID bermanfaat.

Program pembelian yang bertanggungjawab bagi produk-produk hutan bertujuan untuk memperbaiki kinerja lingkungan hidup dan sosial bagi basis pasokan dengan mengakhiri pembelian produk-produk yang berasal dari kayu ilegal atau dari sumber yang tidak jelas, dan dengan secara terus menerus meningkatakan proporsi pembelian produk hutan yang berasal dari kayu dari hutan-hutan yang tersetifikasi secara jelas.

Untuk mencapai transisi ini, dari manapun titik permulaannya, SENADA telah membangun sebuah program aktifitas yang dapat membantu sektor furnitur kayu Indonesia untuk memelihara dan mengembangkan pangsa pasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mepraktekkan dengan pengadaaan kayu yang bertanggungjawab dan karena itu memastikan semua pasokan bahan mentah terverifikasi secara legal asal muasalnya. SENADA akan mensosialisasikan kesuksesan program ini pada sektor lain sebagai bagian dari kampanye advokasi yang lebih luas tentang pentingnya pengadaan yang bertanggungjawab dan verifikasi melalui pihak ketiga.

6.2. REKOMENDASI

1. **SENADA harus sangat berhati-hati dalam memilih klien.** Mereka yang hanya mengambil bahan baku dari Jawa harus dipilih. Perusahaan yang mengambil bahan baku kayu dari pulau lain di Indonesia akan sangat sulit membuktikan bahwa asal muasal bahan baku mereka adalah legal. Isu utama dari program ini yang harus dipertimbangkan adalah kompleksitas rantai pasokan. Rantai pasokan di Jawa meskipun kompleks hanya berasal dari beberapa sumber perkebunan dank arena itu resiko SENADA menajadi berkurang. Manakala perusahaan mulai membeli bahan baku dari Kalimatan dan Papua maka resiko kayu ilegal masuk ke rantai pasokan akan meningkat berkali-kali lipat.

2. **SENADA perlu sangat berhati-hati dalam memilih perusahan konsultansi.** Dukungan pada klien adalah bagian yang sangat penting dari program ini. Diperlukan banyak waktu dan usaha untuk mentransformasi system rantai penanganan yang berfungsi dalam arti bisnis menjadi suatu yang dapat memenuhi persyaratan penilaian pihak ketiga yang berdasarkan pada standard pengadaan lingkungan internasional. Cara yang terbaik dan tercepat bagi SENADA untuk mencapai transisi ini adalah dengan menggunakan konsultan yang ahli dan berpengalaman. Perusahaan-perusahaan ini akan dapat memberikan dukungan berkelanjutan yang diperlukan untuk memastikan sebuah perusahaan mampu menyesuaikan prosedurnya untuk memenuhi standard lingkungan internasional.

3. **Usaha promosi eksternal dan hubungan pasar.** SENADA harus mengembangkan lebih lanjut rencana untuk membantu industri ini meningkatkan proses promosi ekspor. SENADA telah melakukan awal yang baik dengan bekerjasama dengan Swiss Import Promotion Program (SIPPO). Upaya ini harus dijadikan dasar dan usaha-usaha harus ditujukan untuk menciptakan kemitraan yang lebih luas dengan asosiasi pengusaha Eropa untuk furnitur dan kayu. Lebih

jauh, pengembangan situs promosi dan informasi, disertai dengan partispasi dalam banyak pameran perdagangan, akan berguna bagi klien SENADA. Dan akhirnya siaran pers dan artikel harus dimuat di jurnal-jurnal terkait perdagangan.

4. **Masalah Tanggung Jawab Sosial**. ENADA harus mengembangkan kemapuan untuk memperkenalkan perusahaan Indonesia dengan standard tanggung jawab sosial di seluruh dunia (SA8000, WRAP) dan menggunakan standard ini dalam secara positif dan proaktif untuk tujuan pemasaran.

5. **Bangun pendekatan linta proyek.** Fokus internasional sekarang ada pada Indonesia dan bagaimana negara ini mengelola hutannya. SENADA harus membangun hubungan dengan proyek lembaga donor yang terlibat dalam kehutanan untuk memperoleh pemahaman kerja mereka dan membangun kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Brack, D., & Saunders, J., (2006) 'Demand Side Options', Chatham House, UK.

Brack, D., (2006) 'Illegal Logging', Briefing paper Chatham House UK.

Fischer, C., Aguilar, F., et al (2005) 'Forest Certification: Toward Common Standards' World Bank

Garforth, M., (2004) 'To Buy or Not to Buy'. FERN

ITTO (2006) 'Where is procurement heading?' ITTO Publications

SmartWood (2007) 'Generic Standard for Verification of Legal Origin', SmartWood draft standard Version-1 January 2007.

SmartWood (2007) 'Veriification of Logal Origin Report Template', SmartWood.

TFF (2004) 'Standard for the Verification of Legal Origin of Wood Products Exported from Indonesia' Tropical Forest Foundation draft standard version 4.2 December 2004.

TFT (2006) 'sourcing legal timber from Indonesia' Timber Trade Federation, UK.

The Stationery Office (2005) 'House of Commons EAC Sustainable Timber', The Stationery Office Ltd.

Timber Trade Federation (2006) 'Price premium for verified legal timber and sustainable timber', Timber trade Federation UK.

TTF (2005) 'Responsible Purchasing Policy' Timber Trade Federation, UK

White, G.,& Sarshar, D., (2006) 'Keep it Legal', WWF International.

White, G.,& Sarshar, D., (2006) 'Responsible Purchasing Guide', WWF International

LAMPIRAN

DAFTAR PERUSAHAAN DAN MITRA YANG DIKUNJUNGI

Mitra Potensial

C8-Global Pty Ltd.	*Alamat tidak diketahui* Tel: +62-813-258-777-13 (Indonesia) Tel: +84-908-721-636 (Vietnam) Email: dejan@c8-global.com
GFS	Global Forestry Services Sdn Bhd, 9B Jl. Setiapuspa Medan Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +603-2093-5007, Fax: +603-2093-2007, HP: +601-2376-0608 www.gfsinc.biz
INDRI	Jl. Gereja No. 4 Paledang Bogor 16122, Indonesia Tel: +62-251-387-385 www.indri-indonesia.org
PENSA	Jl. Raya By Pass Ngurah Rai No. 108X Pedungan, Denpasar Bali 80223, Indonesia Tel: +62-361-72-5599, or +62-8111-92511, or +62-361-724-220 www.ifc.org/pensa
SGS	Cilandak Commercial Estate No.108C Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta 12560, Indonesia Tel: +62-21-781-8111, Fax: +62-21-781-8222 www.sgs.com
SmartWood	SmartWood Program, Rainforest Alliance Jl. Ciung Wanara No. 1X Ronon, Denpasar Bali 80225, Indonesia Tel: +62-361-224-356, Fax: +62-361-235-875 www.rainforest-alliance.org
TFF	Manggala Wanabakti Bld IV, 9th Floor, Wing B Jl. Jend. Gatat Subroto, Senayan Jakarta 10270, Indonesia Tel: +62-21-573-5589, Fax: +62-21-5790-2925
TFT	Graha Perentis Kemerdekaan 77 Semarang, Indonesia Tel: +62-24-746-3401, Fax: +62-24-746-3406
WWF	Kantor Taman A9, Unit A-1, Jl. Mega Kuningan Lot B 8-9/A9 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia Tel: +62-21-576-1070, Fax: +62-21-576-1080 www.wwf.or.id

Perusahaan – Perusahaan di Wilayah Surabaya

PT Acaccia	PT Kernel	PT Mitra Mandiri
PT Anggun	PT Kurnia	PT Nathania
PT Katwara	PT Mahkota	

Perusahaan di Wilayah Semarang dan Solo

PT Dhana Dito	PT Nathania	PT Sylva
PT Artanis	PT Putra Bengawan	PT Tradesa
PT Hartco	PT Roda Jati	
CV Mekar Jaya.	PT Wisanka	
PT Mirota	PT Surya Gumilar	

SENADA – Indonesia Competitiveness Program
BRI II Tower, 8th Fl, Suite 805
Jl. Jendral Sudirman No. 44 – 46
Jakarta 10210
www.senada.or.id